



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 163 /PMK.010/2019  
TENTANG  
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEMENTARA  
TERHADAP IMPOR PRODUK TIRAI (TERMASUK GORDEN),  
KERAI DALAM, KELAMBU TEMPAT TIDUR, DAN  
BARANG PERABOT LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, dalam hal pemulihan kerugian industri dalam negeri sulit dilakukan akibat keterlambatan pengenaan Tindakan Pengamanan, maka selama masa penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia dapat merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan untuk mengenakan Tindakan Pengamanan Sementara yang dilakukan dalam bentuk pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara;
- b. bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan awal Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia terdapat kerugian serius yang dialami industri dalam negeri akibat dari lonjakan jumlah impor produk tirai

14

(termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap Impor Produk Tirai (termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

1A

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEMENTARA TERHADAP IMPOR PRODUK TIRAI (TERMASUK GORDEN), KERAJ DALAM, KELAMBU TEMPAT TIDUR, DAN BARANG PERABOT LAINNYA.

Pasal 1

Terhadap barang impor berupa produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang termasuk dalam pos tarif 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan sebesar Rp.41.083,00/kg (empat puluh satu ribu delapan puluh tiga rupiah per kilogram).

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang diproduksi dari negara yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

f R

#### Pasal 4

- (1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
  - a. tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*); atau
  - b. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak terpenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara atas importasi dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*).

#### Pasal 5

Terhadap impor produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*).

Pasal 6

Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Peraturan Menteri ini berlaku selama 200 (dua ratus) hari terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 November 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1424

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.  
Kepala Bagian TU Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 19710912 199703 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 163 /PMK.010/2019  
TENTANG  
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN  
SEMENTARA TERHADAP IMPOR PRODUK TIRAI  
(TERMASUK GORDEN), KERAI DALAM, KELAMBU  
TEMPAT TIDUR, DAN BARANG PERABOT LAINNYA

DAFTAR NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN  
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEMENTARA TERHADAP  
IMPOR PRODUK TIRAI (TERMASUK GORDEN), KERAI DALAM,  
KELAMBU TEMPAT TIDUR, DAN BARANG PERABOT LAINNYA

| NO. | NAMA NEGARA                     | NO. | NAMA NEGARA                      |
|-----|---------------------------------|-----|----------------------------------|
| 1.  | Afghanistan                     | 24. | Colombia                         |
| 2.  | Albania                         | 25. | Congo                            |
| 3.  | Angola                          | 26. | Costa Rica                       |
| 4.  | Antigua and Barbuda             | 27. | Cote d' Ivore                    |
| 5.  | Argentina                       | 28. | Cuba                             |
| 6.  | Armenia                         | 29. | Democratic Republic of the Congo |
| 7.  | Bahrain, Kingdom of             | 30. | Djibouti                         |
| 8.  | Bangladesh                      | 31. | Dominica                         |
| 9.  | Barbados                        | 32. | Dominican Republic               |
| 10. | Belize                          | 33. | Ecuador                          |
| 11. | Benin                           | 34. | Egypt                            |
| 12. | Bolivia, Plurinational State of | 35. | El Salvador                      |
| 13. | Botswana                        | 36. | Fiji                             |
| 14. | Brazil                          | 37. | Gabon                            |
| 15. | Brunei Darussalam               | 38. | Gambia                           |
| 16. | Burkina Faso                    | 39. | Georgia                          |
| 17. | Burundi                         | 40. | Ghana                            |
| 18. | Cabo Verde                      | 41. | Grenada                          |
| 19. | Cambodia                        | 42. | Guatemala                        |
| 20. | Cameroon                        | 43. | Guinea                           |
| 21. | Central African Republic        | 44. | Guinea-Bissau                    |
| 22. | Chad                            | 45. | Guyana                           |
| 23. | Chile                           | 46. | Haiti                            |

18

| NO. | NAMA NEGARA                      | NO.  | NAMA NEGARA                                       |
|-----|----------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| 47. | Honduras                         | 82.  | Oman                                              |
| 48. | Hong Kong, China                 | 83.  | Pakistan                                          |
| 49. | India                            | 84.  | Panama                                            |
| 50. | Israel                           | 85.  | Papua New Guinea                                  |
| 51. | Jamaica                          | 86.  | Paraguay                                          |
| 52. | Jordan                           | 87.  | Peru                                              |
| 53. | Kazakhstan                       | 88.  | Philippines                                       |
| 54. | Kenya                            | 89.  | Qatar                                             |
| 55. | Korea, Republic of               | 90.  | Russian Federation                                |
| 56. | Kuwait, The State of             | 91.  | Rwanda                                            |
| 57. | Kyrgyz Republic                  | 92.  | Saint Kitts and Nevis                             |
| 58. | Lao People's Democratic Republic | 93.  | Saint Lucia                                       |
| 59. | Lesotho                          | 94.  | Saint Vincent and the Grenadines                  |
| 60. | Liberia                          | 95.  | Samoa                                             |
| 61. | Liechtenstein                    | 96.  | Saudi Arabia, Kingdom of                          |
| 62. | Macao, China                     | 97.  | Senegal                                           |
| 63. | Madagascar                       | 98.  | Seychelles                                        |
| 64. | Malawi                           | 99.  | Sierra Leone                                      |
| 65. | Malaysia                         | 100. | Solomon Islands                                   |
| 66. | Maldives                         | 101. | South Africa                                      |
| 67. | Mali                             | 102. | Sri Lanka                                         |
| 68. | Mauritania                       | 103. | Suriname                                          |
| 69. | Mauritius                        | 104. | Swaziland                                         |
| 70. | Mexico                           | 105. | Chinese Taipei                                    |
| 71. | Moldova, Republic of             | 106. | Tajikistan                                        |
| 72. | Mongolia                         | 107. | Tanzania                                          |
| 73. | Montenegro                       | 108. | Thailand                                          |
| 74. | Morocco                          | 109. | The Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) |
| 75. | Mozambique                       | 110. | Togo                                              |
| 76. | Myanmar                          | 111. | Tonga                                             |
| 77. | Namibia                          | 112. | Trinidad and Tobago                               |
| 78. | Nepal                            | 113. | Tunisia                                           |
| 79. | Nicaragua                        | 114. | Turkey                                            |
| 80. | Niger                            | 115. | Uganda                                            |
| 81. | Nigeria                          | 116. | Ukraine                                           |

| NO.  | NAMA NEGARA                       | NO.  | NAMA NEGARA |
|------|-----------------------------------|------|-------------|
| 117. | United Arab Emirates              | 121. | Viet Nam    |
| 118. | Uruguay                           | 122. | Yemen       |
| 119. | Vanuatu                           | 123. | Zambia      |
| 120. | Venezuela, Bolivarian Republic of | 124. | Zimbabwe    |

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

19